

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Windi Sukma Tangahu, Harun Blongkod, Lukman Pakaya

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Data yang digunakan yakni data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada Pemerintah Desa se-Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *sampling purpose* sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan bantuan program AMOS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), 2) Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), 3) Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Copyright (c) 2023 Windi Sukma Tangahu

✉ Corresponding author :

Email Address : windisukma18@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. APBDes bersumber dari APBD dan APBN bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, Bidang pelaksanaan pembangunan, Bidang pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan dalam pemerintah Desa dapat menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota kemudian dalam Pelaksanaannya itu dilakukan dalam pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya yang menimbulkan transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua Penerimaan dan

pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Selanjutnya Penatausahaan pemerintah desa dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib mengelolanya adalah Bendahara Desa. Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan yang berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Kepala desa sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasannya tersebut harus didukung atas penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dibutuhkan kompetensi aparatur untuk mengelola keuangan desa untuk mencapai tujuan dengan keadilan serta pemerataan yang efisien.

Permendagri No. 20 tahun 2018 pada pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menetapkan objek penelitian di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango yang Terdiri dari 8 (delapan) desa yang memiliki banyak potensi baik potensi pertanian. Berikut laporan APBDes (Anggaran pendapatan Belanja Desa) Di Desa se-Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022 pada Tabel berikut :

**Tabel 1.1 Laporan APBDes Tahun 2022
Desa se-Kecamatan Suwawa Selatan**

No.	Nama Desa	Anggaran	Realisasi	Prosentasi
1	Desa Bondaraya	1.292.396.539	1.289.371.891	99,77%
2	Desa Bondawuna	1.356.972.549	1.353.275.757	99,73%
3	Desa Bonedaa	1.336.985.916	1.333.625.196	99,75%
4	Desa Bulontala	1.026.735.057	1.023.710.409	99,71%
5	Desa Bulontala Timur	1.313.624.142	1.310.599.494	99,77%
6	Desa Pancuran	950.629.044	947.940.468	99,72%
7	Desa Libungo	1.018.559.739	1.015.199.019	99,67%
8	Desa Molintogupo	1.063.445.079	1.053.183.990	99,04%

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat Dilihat bahwa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa se-Kecamatan Suwawa Selatan terkait Anggaran dan realisasi telah Terealisasi dengan baik dapat dilihat dari Anggaran Desa Bondaraya dan Bulontala timur yang memiliki Prosentasi sangat tinggi yang mencapai 99,77%, selanjutnya Desa Bonedaa,

Bondawuna dan Pancuran yang Memiliki Prosentase Cukup Tinggi yaitu 99,75%, 99,73% dan 99,72% dan desa selanjutnya yaitu Bulontala dan Libungo yang memiliki prosentase sebesar 99,71% dan 99,67% Dan terakhir dengan Prosentase cukup tinggi yakni desa Molintogupo yakni 99,04%.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa Anggaran dan realisasi di desa se-Kecamatan Suwawa selatan telah direalisasikan dengan baik namun Berdasarkan pengamatan dilapangan peneliti menemukan bahwa masih ada desa yang belum memiliki papan pengumuman pada APBDesa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

METODOLOGI

Lokasi penelitian Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) adalah di desa-desa di wilayah kecamatan Suwawa Selatan. pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap APBDes yang dilaksanakan oleh pengelola APBDes dan masyarakat di wilayah kecamatan Suwawa Selatan perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya tata kelola yang baik. Wilayah desa di Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Yang terdiri dari 8 desa Dengan kode pos 96563 khusus wilayah Kecamatan Suwawa Selatan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer. Data primer yakni data yang diperoleh tanpa perantara dan langsung dari sumbernya. Dan data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada Pemerintah desa se-Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Menurut (Sugiyono, 2017:142) "Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya". Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah 8 desa di Kecamatan Suwawa Selatan.

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu *sampling purpose*. Menurut Sugiyono (2015:65) *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan *sampling purpose* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam hal ini yaitu yang memahami dan mengetahui masalah yang diteliti lebih efisien, dan yang terlibat dalam masalah pengelolaan keuangan desa dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan dan memahami suatu rancangan peraturan desa. Maka sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 orang dengan kriteria sampel adalah yang memahami serta berhubungan langsung dengan variabel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Variabel Transparansi (X_1)

Kuesioner penelitian variabel Transparansi terdiri atas 12 item pertanyaan. Hasil perhitungan korelasi untuk skor setiap butir pertanyaan dengan total skor variabel Transparansi dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Validitas Variabel
Transparansi X₁**

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
1	2	3	4	5	6
1	Transparansi X ₁	X _{1.1}	0,776	> 0.5	Valid
		X _{1.2}	0,829	> 0.5	Valid
		X _{1.3}	0,596	> 0.5	Valid
		X _{1.4}	0,862	> 0.5	Valid
		X _{1.5}	0,785	> 0.5	Valid
		X _{1.6}	0,816	> 0.5	Valid
		X _{1.7}	0,810	> 0.5	Valid
		X _{1.8}	0,709	> 0.5	Valid
		X _{1.9}	0,837	> 0.5	Valid
		X _{1.10}	0,720	> 0.5	Valid
		X _{1.11}	0,818	> 0.5	Valid
		X _{1.12}	0,776	> 0.5	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam setiap variabel Transparansi memiliki nilai *loading factor* di atas 0,5 sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item kuesioner variabel Transparansi valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X₂)

Kuesioner penelitian variabel Akuntabilitas terdiri atas 12 item pernyataan. Hasil perhitungan korelasi untuk skor setiap butir pertanyaan dengan total skor variabel Akuntabilitas dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Perhitungan Validitas Variabel
Akuntabilitas X₂**

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
1	2	3	4	5	6
1	Akuntabilitas X ₂	X _{2.1}	0,656	> 0.5	Valid
		X _{2.2}	0,751	> 0.5	Valid
		X _{2.3}	0,804	> 0.5	Valid
		X _{2.4}	0,850	> 0.5	Valid
		X _{2.5}	0,710	> 0.5	Valid
		X _{2.6}	0,808	> 0.5	Valid
		X _{2.7}	0,844	> 0.5	Valid
		X _{2.8}	0,862	> 0.5	Valid
		X _{2.9}	0,804	> 0.5	Valid

X _{2.10}	0,888	> 0.5	Valid
X _{2.11}	0,841	> 0.5	Valid
X _{2.12}	0,702	> 0.5	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam setiap variabel Akuntabilitas memiliki nilai *loading factor* di atas 0,5 sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item kuesioner variabel Akuntabilitas valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Y)

Kuesioner penelitian variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa terdiri atas 9 item pernyataan. Hasil perhitungan korelasi untuk skor setiap butir pertanyaan dengan total skor variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Validitas Variabel
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
1	2	3	4	5	6
3	Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Y	Y.1	0,792	> 0.5	Valid
		Y.2	0,820	> 0.5	Valid
		Y.3	0,870	> 0.5	Valid
		Y.4	0,929	> 0.5	Valid
		Y.5	0,847	> 0.5	Valid
		Y.6	0,871	> 0.5	Valid
		Y.7	0,802	> 0.5	Valid
		Y.8	0,883	> 0.5	Valid
		Y.9	0,858	> 0.5	Valid

Sumber: Data diolah, 2023.

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa memiliki nilai *loading factor* di atas 0,5 sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item kuesioner variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur instrumen penelitian yang mengukur indikator dari setiap variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel Penelitian	Alpha Cronbach's	Alpha Toleransi	Status Item
1	Transparansi (X ₁)	0.949	0.6	Reliabel
2	Akuntabilitas (X ₂)	0.953	0.6	Reliabel
3	Pengelolaan APBDes (Y)	0,959	0.6	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas karena memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,6 atau lebih ($\alpha \geq 0,6$) Sunyoto, (2009), sehingga dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti, hasil tersebut juga menunjukkan tingkat konsistensi berada di atas syarat yang ditentukan.

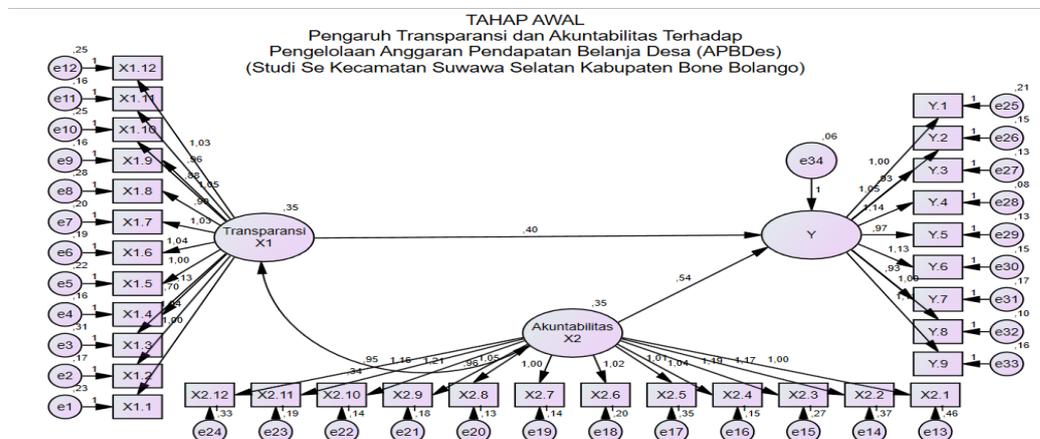
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Uji Struktural Equation Modeling (SEM)

Uji Model Tahap Awal

Berdasarkan cara penentuan nilai dalam model, maka variabel pengujian model pertama ini dikelompokkan menjadi variabel eksogen (*exogenous variable*) dan variabel endogen (*endogenous variable*). Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan melalui persamaan atau dari model hubungan yang terbentuk. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Transparansi (X₁) dan Akuntabilitas (X₂). Sedangkan variabel endogen adalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Y).

Model dikatakan baik bilamana pengembangan model hipotetis secara teoritis didukung oleh data empirik. Hasil analisis SEM pada tahap awal secara lengkap dapat dilihat pada Gambar berikut:



Hasil uji konstruk model dievaluasi berdasarkan GFI, kriteria model serta nilai kritisnya yang memiliki kesesuaian dengan data dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5. Evaluasi GFI Overall Model (Uji Tahap Awal)

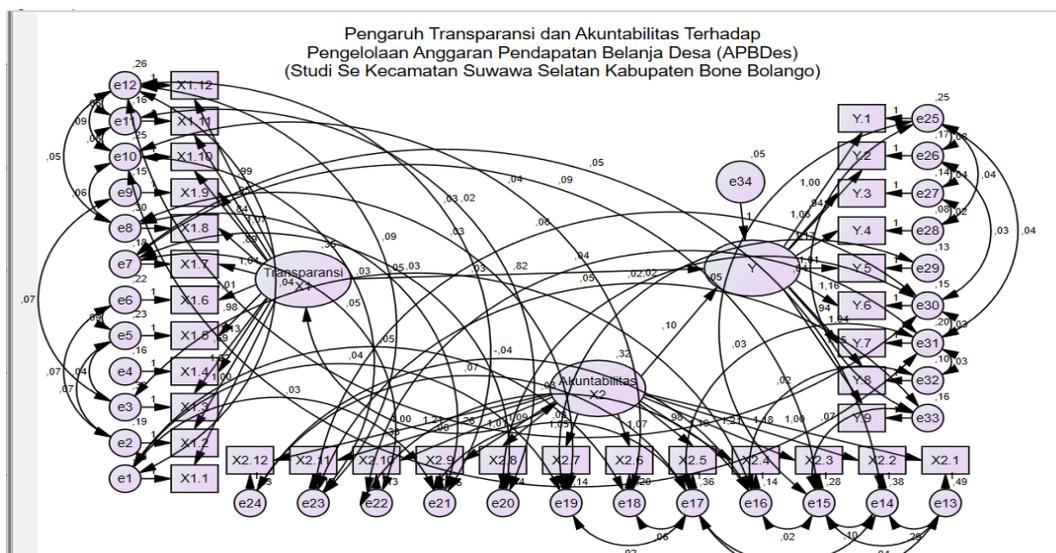
Kriteria	Cut-Off Value	Hasil Model	Evaluasi Model
Chi-square	$\leq 5,05, 33 = \geq 47,40$	1083,77	<i>Bad fit</i>
Probability	$\geq 0,05$	0,00	<i>Bad fit</i>
CMIN/DF	$\leq 3,00$	2,20	<i>Good Fit</i>
GFI	$\geq 0,90$	0,60	<i>Marginal Fit</i>
AGFI	$\geq 0,90$	0,54	<i>Bad fit</i>
TLI	$\geq 0,95$	0,82	<i>Marginal Fit</i>
RMSEA	$\leq 0,08$	0,11	<i>Bad fit</i>

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.25 di atas maka dapat diketahui bahwa model belum layak digunakan. Dimana pada tabel di atas nampak dari semua kriteria masih ada yang belum memenuhi kriteria GFI. Berdasarkan petunjuk *modification indeces* kemudian dilakukan modifikasi untuk memperbaiki model sehingga valid untuk pembuktian hipotesis. Modifikasi model diutamakan hanya pada korelasi antar item dan atau *error*, hingga dihasilkan model akhir struktural.

Uji Model Tahap Akhir

Uji model akhir keterkaitan antara Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan APBDes, secara lengkap disajikan pada gambar berikut. Selanjutnya hasil uji konstruk model akhir dievaluasi berdasarkan evaluasi GFI Overall Model (Uji Tahap Awal), kriteria model serta nilai kritisnya yang memiliki kesesuaian dengan data :



Gambar 4 Hasil Analisis Structure Equation Modelling Tahap Akhir

Sumber data: lampiran 4

Setelah melakukan modifikasi dengan mengkorelasikan X dan Y kemudian e_1 sampai dengan e_{33} maka hasil hari dari uji CFA overal model seperti berikut. Adapun hasil *Goodness of Fit Indeces Goodness of Fit Indeces* dari overa model, di Table 4.19, berikut:

Tabel 4.26
Evaluasi GFI Overall Model (Uji Tahap Akhir)

Kriteria	Cut-Off Value	Hasil Model	Evaluasi Model
Chi-square	$\leq 5,05, 33 = \geq 47,40$	605,109	<i>Marginal Fit</i>
Probability	$\geq 0,05$	0,00	<i>Marginal Fit</i>
CMIN/DF	$\leq 3,00$	1,39	<i>Good Fit</i>
GFI	$\geq 0,90$	0,75	<i>Marginal Fit</i>
AGFI	$\geq 0,90$	0,68	<i>Marginal Fit</i>
TLI	$\geq 0,95$	0,94	<i>Good Fit</i>
RMSEA	$\leq 0,08$	0,06	<i>Good Fit</i>

Sumber data: lampiran 4

Tabel tersebut menunjukkan kriteria variabel-variabel pada model menunjukkan kriteria *goodnes of fit indices* semuanya sudah terpenuhi. Selanjutnya semua kriteria telah terpenuhi maka selanjutnya akan diperlihatkan nilai koefisien regresi dan *critical ratio* dari masing-masing variabel.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial

Selanjutnya yang akan dilakukan pada penelitian yakni melakukan pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan nilai *t-value* dengan tingkat signifikan 0,05. Dalam program Amos 24 nilai *t-value* merupakan nilai *Critical Ratio* (c.r) pada *Regression Weights : (Group number 1 - Default Model)* dari *fit model (Full Model)*. Apabila nilai C.R $\geq 1,660$ atau nilai probabilitas (P) $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak (hipotesis penelitian diterima). Berikut nilai *Regression Weights : (Group number 1 - Default Model)* hasil pengolahan amos 24:

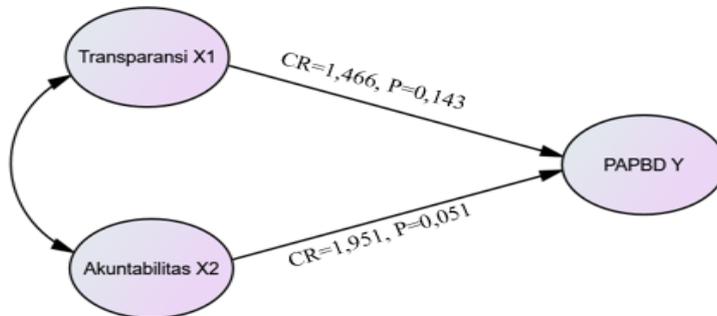
Tabel 4.27
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

VARIABEL		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label	
Y	<---	Transparansi_X1	0,398	0,271	1,466	0,143	par_31
Y	<---	Akuntabilitas_X2	0,544	0,279	1,951	0,051	par_32

Sumber data: diolah kembali, 2023

Tabel 4.27 di atas dijadikan sebagai acuan utama untuk melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini. Kriteria pengujian adalah tolak H_0 jika nilai *t-value* atau *Critical Ratio* (C.R.) $\geq 1,660$ atau nilai $p \leq 0,05$. Berdasarkan tabel 4.34 di atas dapat dibuat diagram koefisien t_{hitung} hasil analisis full model_2 seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Se Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango)



Gambar 4.14 Koefisien t_{hitung} Full Model_2

Hasil pengujian terhadap seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 1 (Transparansi)

Hipotesis 1 : Tranparansi (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Y)

Berdasarkan tabel 4.31, nilai t_{value} atau C.R. sebesar 1,466 < 1,660 atau P sebesar 0,143 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

2. Pengujian Hipotesis 2 (Akuntabilitas)

Hipotesis 2 : Akuntabilitas (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Y)

Berdasarkan tabel 4.31, nilai t_{value} atau C.R. sebesar 1,951 > 1,660 atau P sebesar 0,051 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Uji Simultan

Tabel 4.28 Uji Simultan (R-Square)

Squared Multiple Correlations:(Group number 1-Default Model)

	Estimate
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	0,982

Berdasarkan tabel di atas nilai *R-square* variabel laten eksogen terhadap variabel laten Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yaitu sebesar 0,982 atau 98,2%, yang artinya secara simultan Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) memiliki pengaruh terhadap variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Y) sebesar 98,2% sedangkan 1,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Transparansi (X_1) Secara Parsial terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Menurut hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengelolaan anggaran Pendapatan belanja desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai p value yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,143. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hipotesis H_1 dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, dan Josef Kairupan, 2016) yang menyebutkan bahwa tidak adanya keterbukaan/ transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, dan Josef Kairupan, 2016) yang menyebutkan bahwa tidak adanya keterbukaan/ transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes.

Pengaruh Akuntabilitas (X_2) Secara Parsial terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes)

Menurut hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Hal ini dapat dilihat dari nilai p value yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,051. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hipotesis H_2 dalam penelitian ini diterima. Dalam penelitian ini Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, 2015) yang menyebutkan bahwa Manajemen keuangan Desa Kapatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

Transparansi (X_1), dan Akuntabilitas (X_2) Secara Simultan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes)

Menurut hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Nilai r-square menunjukkan nilai 0,982 yang artinya variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 98,2% dan 1,8% dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Herawati, 2019) yang berpendapat bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah desa telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

SIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang peneliti lakukan melalui analisa data serta kuesioner yang disebar, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDes) yang dibuktikan dengan hasil uji signifikansi yang menunjukkan nilai dari $p\text{-value}$ sebesar $0,143 > 0,05$.
2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDes) yang dibuktikan dengan hasil uji signifikansi yang menunjukkan nilai dari $p\text{-value}$ sebesar $0,051 < 0,05$.
3. Secara simultan Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan belanja Desa 98,2%

Referensi :

- Kumalasari, deti 2016. *Transfaransi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam*. Vol. 5, no. November, 2016.
- Mardiasmo. "Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akun Tansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governace." *Jurnal Akuntansi Pemerin Tahan Vol. 2, No.1*, 2006.
- Ghozali, I. (2016). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 24*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Ofsett.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Goverment*. Malang: Bayu
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta
- Nasirah. 2016. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. Akuntansi, Universitas Muhammdiyah Malang.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. 2005. *tentang Desa*
- Permendagri Nomor 113. 2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *tentang Desa*.
- Sugiyono. (2012b). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2010a). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung ; CV Alfabeta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Abdullah, Syukriy dan Halim, Abdul. 2006. **Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan**. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan (Online) Vol.2 No.2 (1-18)*<http://swamandiri.org>, diakses 30 Mei 2011).